

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Untuk memperdalam ilmu agama maka banyak didirikan pondok pesantren diberbagai wilayah di Indonesia. Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang modern dan perkembangan teknologi serta cara/teknik dalam dunia bisnis melalui koperasi yang ada dilingkungan pondok pesantren.

Pemberdayaan ekonomi di Pesantren bukan hanya berbentuk bisnis kecil-kecilan yang dikelola secara sederhana, karena sebagian dari mereka bahkan telah menggarap berbagai bidang usaha yang beromzet besar dengan menggunakan manajer yang profesional serta padat teknologi modern, namun demikian masih ada pula yang berada dalam taraf awal berusaha dan atau mengalami kesulitan dalam mengelola usaha.

Unit usaha yang biasanya berada dalam lingkup pesantren adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Cirebon memiliki 63 kopontren yang tersebar di berbagai daerah bagian utara, selatan, barat, dan timur Kabupaten Cirebon.

Banyaknya Kopontren yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon kurang didukung oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang menyebabkan

masyarakat lebih tertarik untuk membeli barang kebutuhan ditoko ataupun minimarket dan swalayan yang ada didekat rumahnya. Pada umumnya walaupun dia merupakan anggota suatu koperasi, dia jarang melakukan transaksi pembeliannya di Koperasi.

Hal ini dikarenakan sering ditemui di lapangan adanya harga jual suatu barang yang ditetapkan oleh koperasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual yang ditetapkan oleh toko atau swalayan maupun mini market, sehingga walaupun seseorang itu merupakan anggota koperasi, dia akan lebih senang berbelanja kebutuhan pokoknya di toko atau minimarket maupun swalayan. Dengan kata lain, anggota koperasi jarang memberikan partisipasinya kepada koperasi dalam hal pembelian.

Dengan semakin rendahnya partisipasi anggota dalam hal pembelian kepada koperasi, tidak jarang volume usaha yang dihasilkan oleh koperasi mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sedangkan biaya operasional sehari-hari yang ditanggung koperasi tidak berkurang. Hal ini tentunya akan memberikan dampak tidak hanya kepada perkembangan usaha koperasi tersebut tetapi juga berdampak kepada kesejahteraan anggotanya.

Dengan adanya tujuan koperasi yang sudah ditetapkan berupa kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka pengurus koperasi dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika dibandingkan dengan badan usaha lain yang ada di Indonesia tujuan koperasi lebih mulia dibandingkan dengan badan usaha lainnya, dan agar kegiatan usaha

koperasi berhasil dengan baik maka harus didukung oleh manajemen yang baik dan organisasi yang tangguh. (Subandi, 2008 : 68)

Pada kenyataannya tujuan koperasi itu kurang didukung oleh adanya partisipasi aktif anggota maupun masyarakat, sehingga banyak koperasi yang kurang berkembang usahanya dan tidak bisa mencapai tujuannya. Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat dari volume usaha dan SHU yang dihasilkannya dalam satu tahun.

Dalam mengembangkan usahanya, setiap koperasi menemui berbagai hambatan baik yang berasal dari dalam koperasi tersebut, maupun yang berasal dari luar koperasi. Hambatan-hambatan tersebut banyak yang dibiarkan begitu saja oleh para pengurus koperasi karena kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pengurus koperasi, sehingga lama kelamaan banyak koperasi yang berguguran dan hanya tinggal namanya saja tanpa adanya kegiatan usaha yang dijalankannya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dari berbagai badan usaha yang ada di Indonesia, hanya koperasi yang didirikan atas dasar asas kekeluargaan sehingga badan usaha yang cocok untuk Indonesia sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 adalah Koperasi.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Cirebon selama tahun 2001 s/d 2010 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif dari tahun ke tahunnya seperti yang terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Koperasi Kabupaten Cirebon

Tahun	Aktif (unit)	Tidak aktif (unit)	Total kop. (unit)
2008	422	85	507
2009	454	87	541
2010	479	86	565

Sumber : Statistik Perkoperasian Indonesia (Kota/Kabupaten)

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2008 s/d 2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ditahun 2008 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon sebanyak 507 unit koperasi, tetapi di tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 34 unit atau 6.71% menjadi 541 unit koperasi. Tahun 2010 jumlah koperasi juga mengalami peningkatan sebanyak 24 unit atau 4.44% menjadi 565 unit.

Koperasi di Kabupaten Cirebon terbagi menjadi tujuh jenis koperasi diantaranya koperasi unit desa (KUD), koperasi simpan pinjam, koperasi pondok pesantren (Kopontren), koperasi serba usaha, koperasi konsumsi, koperasi produksi dan koperasi pemasaran.

Kabupaten Cirebon sendiri banyak memiliki pesantren sehingga untuk memenuhi kebutuhan para santrinya banyak didirikan kopontren. Perkembangan kopontren Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Perkembangan Seluruh Kopontren di Kabupaten Cirebon
Tahun 2008-2010

Tahun	Anggota (Orang)	Modal Sendiri (Juta Rupiah)	Modal Pinjaman (Juta Rupiah)	Volume Usaha (Juta Rupiah)	SHU (Juta Rupiah)
2008	9,393	3,247,667	3,083,213	3,804,142	142,328
2009	9,798	3,427,922	4,272,404	2,513,448	93,911
2010	9,805	4,226,404	3,981,035	548,768	23,672

Sumber : Data normatif keragaan koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon, berbagai tahun.

Pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah anggota koperasi pondok pesantren (Kopontren) yang ada di Kabupaten Cirebon dari tahun 2008 s/d 2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ditahun 2009 peningkatan jumlah anggota kopontren mencapai 405 orang atau 4.31% dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu 9393 sehingga menjadi 9798 orang. Peningkatan jumlah anggota di tahun 2010 tidak sebanyak di tahun 2009, penambahan jumlah anggota hanya 7 orang atau 0.07% menjadi 9805 orang.

Sama halnya dengan jumlah anggota Kopontren, modal sendiri yang dimiliki Kopontren pun mengalami peningkatan selama periode tahun 2008 s/d 2010. Tahun 2009 modal sendiri yang dimiliki kopontren naik sebesar Rp 180,255,000 atau 5.55% dari tahun 2008 yang hanya Rp 3,247,667,000 menjadi Rp 3,427,922,000. Tahun 2010 modal sendiri mengalami peningkatan sebesar Rp 798,482,000 atau 23.29% menjadi Rp 4,226,404,000.

Modal luar yang dimiliki oleh Kopontren di Kabupaten Cirebon pada tahun 2008 mencapai Rp 3,083,213,000. Ditahun 2009 modal luar yang dimiliki mengalami peningkatan sebesar Rp 1,189,191,000 atau 38.57% menjadi Rp

4,272,404,000. Pada tahun 2010 modal luar yang dimiliki mengalami penurunan sebesar Rp 291,369,000 atau 6.82% menjadi Rp 3,981,035,000.

Dilihat dari volume usaha Kopontren yang ada di Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2008 s/d 2010 memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya. Tahun 2008 volume usaha yang dihasilkan mencapai Rp 3,804,142,000, tetapi ditahun berikutnya volume usaha yang dihasilkan mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut. Penurunan ditahun 2009 mencapai Rp 1,290,694,000 atau 33.93% menjadi Rp 2,513,448,000. Sedangkan pada tahun 2010 penurunan volume usaha yang dihasilkan mencapai Rp 1,964,680,000 atau 78,17% menjadi Rp 548,768,000.

Sama halnya dengan kondisi yang dialami oleh volume usaha kopontren, sisa hasil usaha (SHU) yang dihasilkan Kopontren selama periode tahun 2008 s/d 2010 juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan SHU ditahun 2009 sebesar Rp 48,417,000 atau 34.02% dari tahun 2008 Rp 142,328,00 menjadi Rp 93,911,000. Tahun 2010 penurunan SHU mencapai Rp 70,239,000 atau 74.79% menjadi Rp 23,672,000.

Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan usaha Kopontren di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Winardi (**Rakhmawati Patriatiningrum, 2007:34**) perkembangan dalam arti harfiah adalah bertambah besar/bertambah sempurna. Sedangkan usaha adalah kegiatan atau aktivitas agar diperoleh hasil lebih baik, jadi perkembangan usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran agar mendapat perubahan yang lebih baik atau bertambah

maju, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Penurunan perkembangan usaha Kopontren tentunya harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari masing-masing pengurus Kopontren, sebab apabila hal ini terus menerus dibiarkan akan berdampak pada jumlah SHU yang diterima oleh masing-masing anggota Kopontren sehingga menyebabkan kesejahteraan anggota tidak tercapai dan dalam jangka panjang akan berakibat pada kelangsungan hidup koperasi itu sendiri.

Besar kecilnya volume usaha dan SHU yang dihasilkan oleh Kopontren yang ada di Kabupaten Cirebon ini dikarenakan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam koperasi itu sendiri (faktor internal), maupun yang berasal dari luar koperasi (faktor eksternal). Faktor internal yang dapat menghambat perkembangan usaha koperasi yaitu mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, badan pemeriksa, manajer, karyawan koperasi, modal dan sistem manajemennya. Sedangkan faktor eksternal yang dihadapi oleh koperasi diantaranya yaitu peraturan pemerintah yang bersifat menghambat perkembangan koperasi maupun hal yang berkaitan dengan hubungan baik antar masing-masing koperasi atau dengan badan usaha yang lainnya.

Hal umum yang hampir dialami oleh semua kopontren adalah masalah keterbatasan modal dan kurangnya partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi yang diakibatkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Hal ini menyebabkan masyarakat hanya berperan sebagai anggota koperasi yang pasif, yang hanya menyimpan uangnya untuk memenuhi

kewajibannya sebagai anggota koperasi, tanpa mau memberikan partisipasinya dalam memberikan saran untuk memajukan koperasi, melakukan pembelian di koperasi maupun hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat anggota.

Sikap anggota yang pasif dan tidak mau berpartisipasi aktif dalam koperasi akan berdampak pada perkembangan dan keberhasilan usaha koperasi. Dalam sebuah koperasi, partisipasi aktif anggota merupakan salah satu faktor yang menentukan perkembangan dan keberhasilan koperasi.

Jochen Rophke (2003:170) mengemukakan bahwa keberhasilan dan perkembangan usaha koperasi dipengaruhi oleh faktor internal antara lain : (1) pengelola, (2) pelayanan, (3) permodalan, dan (4) partisipasi anggota. Sedangkan faktor eksternal antara lain pembinaan pemerintah. Hal tersebut dikemukakan juga oleh Sjamsuri, SA dalam bukunya yang berjudul “Kapita selekta koperasi”(2002:29) yang menyatakan bahwa, Koperasi Indonesia belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, karena adanya ada empat faktor penyebab utama yaitu :

- 1) Faktor intenal koperasi, yaitu masih rendahnya kualitas warga koperasi.
- 2) Faktor eksternal koperasi, yaitu masih lemahnya *political will* dan *political action* pemerintah dalam memberdayakan koperasi.
- 3) Kebijakan pemerintah dalam memberdayakan koperasi tidak mendasar, tidak utuh dan tidak serius.
- 4) Politik ekonomi kita yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan untuk mencapai keadilan ekonomi.

Dari uraian diatas, maka penulis ingin meneliti faktor yang menyebabkan perkembangan usaha koperasi terutama koperasi pondok pesantren (Kopontren) di Kabupaten Cirebon dengan berfokus pada faktor struktur modal dan partisipasi anggota yang kemudian dirumuskan dalam judul : **“Pengaruh Struktur Modal dan Partisipasi Anggota Terhadap Perkembangan Usaha Kopontren di Kabupaten Cirebon (Periode Tahun 2008-2010)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, nampak ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi, baik yang berasal dari dalam koperasi itu sendiri maupun yang berasal dari luar koperasi. Faktor yang berasal dari dalam koperasi diantaranya yaitu pengelola, pelayanan, permodalan dan partisipasi anggota. Sedangkan faktor yang berasal dari luar koperasi yaitu pembinaan pemerintah. Namun, untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti pengaruh struktur modal dan partisipasi anggota, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap perkembangan usaha Kopontren di Kabupaten Cirebon?
- 2) Bagaimana pengaruh partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha Kopontren di Kabupaten Cirebon?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

- 1) Struktur modal terhadap perkembangan usaha Kopontren di Kabupaten Cirebon.
- 2) Partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha Kopontren di Kabupaten Cirebon.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan aspek keilmuan (aspek teoritis) dan aspek guna laksana (aspek praktis).

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian per-Koperasi, khususnya yang berhubungan dengan struktur modal dan partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha Kopontren di Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengelola koperasi mengenai pengaruh modal dan partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha koperasi, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang usaha koperasi dapat lebih berkembang lagi.